



TRANSFORMASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI INDONESIA MENUJU GENERASI EMAS 2045

Anisa Amalia Maisaroh^{1*}, Sri Untari¹

¹ Universitas Negeri Malang

*Corresponding author

Email: anisa.amalia.2307128@students.um.ac.id

Abstract

The current challenges of character building include moral and ethical crises due to technological advances, as well as gaps in values and labor market needs. The transformation of character education is important in realizing Indonesia's vision towards the Golden Generation 2045. This study aims to identify character education policies implemented by the Indonesian government, analyze the factors that influence the effectiveness of these policies, and analyze the roles of educational institutions, communities, and government in supporting the implementation of character education policies. The method used in this research is a literature review with five stages: finding literature relevant to the research topic, evaluating literature sources, identifying themes and gaps between theories, creating an outline structure in the preparation of literature, and preparing literature reviews that follow the standard format for writing academic papers. The results show that the character education policy is based on Law No 20 of 2003, Presidential Regulation No 87 of 2017, and Minister of Education, Culture and Research No 47 of 2023. Factors that influence the effectiveness of character education policies include the active involvement of various stakeholders such as teachers, parents, communities and businesses. This inter-stakeholder collaboration can improve policy support, implementation and monitoring, ensuring that each party plays an active role in creating an educational environment that supports students' character development. Educational institutions are responsible for integrating character learning in the curriculum, communities provide support and active participation, and the government makes supporting policies and provides financial support and infrastructure for the implementation of character education at all levels.

Keywords: Transformation, policy, education, Indonesia.

Abstrak

Tantangan pembentukan karakter saat ini meliputi krisis moral dan etika akibat kemajuan teknologi, serta kesenjangan nilai dan kebutuhan pasar kerja. Transformasi pendidikan karakter menjadi penting dalam mewujudkan visi Indonesia menuju Generasi Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan pendidikan karakter yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta menganalisis peran institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan lima tahapan: menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian, evaluasi terhadap sumber-sumber literatur, identifikasi tema dan kesenjangan antara teori, pembuatan struktur garis besar dalam penyusunan literatur, serta penyusunan ulasan literatur yang mengikuti format standar penulisan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter berlandaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017, dan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan karakter meliputi keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komunitas, dan dunia usaha. Kolaborasi antar-stakeholder ini dapat meningkatkan dukungan, implementasi, dan pengawasan kebijakan, memastikan bahwa setiap pihak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter siswa. Institusi pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum, masyarakat memberikan dukungan dan partisipasi

aktif, dan pemerintah membuat kebijakan pendukung serta menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur untuk implementasi pendidikan karakter di semua tingkatan.

Kata Kunci: Transformasi, kebijakan, pendidikan, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia untuk menciptakan sebuah negara yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan menjadi sarana ideal yang sifatnya preventif untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral dan karakter, sehingga nantinya akan menciptakan manusia yang baik (*good people*) (Suwardani, 2020). Namun, tantangan pembentukan karakter generasi muda saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis moral dan etika (Huda, 2017). Di balik kemajuan teknologi yang pesat, terdapat pula sisi kelam yang patut diwaspadai. Penyebaran informasi palsu, kecanduan media sosial, pergeseran pola konsumsi, dan pelanggaran privasi menjadi contoh nyata dampak negatif teknologi yang dapat menggerogoti integritas moral bangsa Indonesia (Ulfah, 2020). Pendidikan yang holistik dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini serta memastikan terbentuknya generasi yang berkarakter kuat dan bermoral tinggi.

Permasalahan pendidikan karakter di Indonesia berkaitan dengan keseimbangan pencapaian akademis dan pembentukan karakter. Pendekatan pendidikan saat ini masih terlalu fokus pada aspek kognitif, mengabaikan aspek afektif dan empati. Kurangnya penekanan pada kejujuran dalam pembelajaran memicu demoralisasi di kalangan pendidik dan peserta didik, yang tidak dipersiapkan menghadapi realitas kehidupan (Suwardani, 2020). Dalam konteks global, pendidikan karakter sangat penting menghadapi tantangan kompleks. Pengembangan generasi muda di Indonesia harus komprehensif. Fokusnya tidak hanya pada kecerdasan akademis, tetapi juga nilai moral, etos kerja positif, dan kemampuan adaptasi tinggi (Mahyuddin *et al.*, 2024). Reformasi sistem pendidikan yang holistik dan seimbang sangat diperlukan untuk

membentuk generasi yang tangguh dan bermoral.

Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai momen penting menuju Indonesia Emas ketika usianya genap 100 tahun. Sasaran utama dari bonus demografi ini adalah generasi milenial. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi adalah apakah generasi muda atau generasi milenial mampu berpikir dan bertindak dengan kesadaran kritis (Permatasari & Murdiono, 2022). Dalam menghadapi tantangan ini, pembentukan moral generasi muda yang memiliki karakter kuat dan siap bersaing di era global menjadi salah satu prioritas utama di bidang pendidikan. Pendidikan karakter menjadi fokus utama untuk mencapai visi Generasi Emas 2045. Karakteristik dari generasi emas ini mencakup kemampuan mengembangkan sikap dan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi (Hartinah *et al.*, 2024). Sistem pendidikan harus bertransformasi untuk mengintegrasikan pembelajaran kognitif dengan pengembangan karakter yang holistik, guna menciptakan generasi yang seimbang dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penetapan kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum (Negara *et al.*, 2021). Fungsi kurikulum dalam pendidikan adalah menjadi sumber acuan untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan (Suryana & Ismi, 2019). Kemampuan literasi digital mendorong generasi milenial untuk bersikap dan berperilaku secara cerdas, positif, dan solutif dalam menghadapi tantangan global. Kualitas pendidikan abad 21 menjadi indikator

keberhasilan pendidikan karakter generasi milenial. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual (IESQ) menjadi tolok ukur penting dalam pembentukan karakter generasi emas milenial 2045 yang unggul (Listyaningsih *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan kebutuhan zaman, memastikan generasi muda tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang mumpuni.

Pendidikan karakter hendaknya tidak hanya menularkan nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan penalaran etis, kesadaran, otonomi, tanggung jawab, dan kasih sayang pada siswa. Pendidikan nilai harus membekali mereka dengan kecakapan intelektual – pemikiran kritis dan evaluasi, refleksi, penemuan, pemahaman, pengambilan keputusan, dan banyak lagi – yang diperlukan untuk penilaian moral yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap kebaikan yang lebih besar (Žiha, 2024). Menanamkan nilai-nilai positif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang etis merupakan tujuan pendidikan karakter. Tujuan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, isu-isu terkait efektivitas dan implementasi pendidikan karakter masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kunci utama untuk mencapai Generasi Emas 2045 terletak pada inovasi pendidikan. Inovasi ini harus mencakup metode dan pendekatan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan keterampilan sosial yang tinggi.

Penelitian oleh Lembong *et al.* (2023) menunjukkan Kebijakan Merdeka Belajar memfasilitasi pembelajaran variatif dan interaktif. Guru bebas menentukan tujuan dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Kebijakan ini mendukung pembelajaran berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Merdeka Belajar juga memungkinkan siswa

mengembangkan potensi dengan memilih mata pelajaran sesuai minat. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan partisipasi siswa dan mutu pembelajaran, serta meminimalisir kesenjangan akses pendidikan.

Penelitian Rambung *et al.* (2023) menunjukkan transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan kebebasan dan keterlibatan aktif siswa. Pendekatannya mengutamakan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri. Hal ini mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia modern.

Penelitian Aziz *et al.* (2022) mengungkapkan proses penyempurnaan kurikulum di Indonesia. Setiap perubahan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum Merdeka menyesuaikan tren global dan dinamika lokal. Sayangnya, belum ada penelitian yang fokus pada transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah Indonesia menuju Generasi Emas 2045. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasi kebijakan pendidikan karakter yang diimplementasikan oleh pemerintah. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan karakter dan peran institusi pendidikan, masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut menuju Generasi Emas 2045.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Transformasi pendidikan menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Transformasi ini diartikan sebagai proses perubahan dalam pola belajar dan pengembangan diri sepanjang hidup, yang bersifat siklus dan berkelanjutan. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal (Mayastinasari *et al.*, 2024). Transformasi

pendidikan harus terus didorong untuk mencapai pendidikan yang relevan dan efektif.

Kurikulum pendidikan di Indonesia tidak luput dari transformasi yang dinamis. Perubahan kurikulum ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa periode, yaitu: masa kemerdekaan dan Orde Lama (1947, 1952, 1964, dan 1968), masa Orde Baru (1975, 1984, dan 1994), serta era reformasi dan sampai sekarang (2004, 2006, 2013, dan 2022). Transformasi ini merupakan cerminan dari pergeseran orientasi dan tujuan pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kategori pertama adalah kurikulum berbasis rencana pembelajaran, yang digunakan pada tahun 1947, 1952, 1964, dan 1968, dengan orientasi pada patriotisme dan nasionalisme. Kategori kedua adalah kurikulum berbasis tujuan, yang digunakan pada tahun 1975, 1984, dan 1994, dengan fokus pada pembelajaran aktif melalui metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Kategori ketiga adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang digunakan pada tahun 2004, 2006, dan 2013, untuk memastikan siswa memiliki tingkat kompetensi tertentu. Terakhir, Kurikulum Merdeka yang digunakan sejak tahun 2022, berfokus pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter (Wijarwadi & Alam, 2023).

Model pendidikan abad 21 menekankan pentingnya berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah yang kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, dan solutif, serta memerlukan kesadaran sosial yang tinggi dan global. Dalam konteks ini, transformasi digital pendidikan di era 5.0 menjadi sangat relevan. Transformasi ini mencakup perubahan paradigma pendidikan, metode pedagogi, pendekatan kognitif, dan inovasi teknologi. Karakteristik khasnya meliputi transisi dari lanskap pendidikan dua dimensi ke multidimensi dan pergeseran evaluasi pengajaran dari penilaian luas ke pengukuran yang tepat.

Arahan Kementerian Pendidikan tahun 2022 tentang Literasi Digital Guru menjadi tonggak penting dalam kerangka transformasi ini. Kebijakan tersebut

memberikan kerangka kerja untuk kesadaran digital, kemahiran teknologi, aplikasi digital, tanggung jawab sosial digital, dan keahlian profesional. Transformasi ini juga mencakup pengembangan kampus digital, tolok ukur informasi, kursus online, dan basis pelatihan simulasi virtual. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan ketepatan tata kelola pendidikan, serta mendukung modernisasi dan strategi pembangunan sosial (Chaiyakun & Yang, 2024). Transformasi pendidikan bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan penyesuaian pedagogi yang relevan. Menyediakan solusi terhadap permasalahan sosial, mengikuti tren zaman, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dengan penguatan karakter.

2.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi sering diidentikkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan (Yuliah, 2020). Sedangkan kebijakan adalah seperangkat gagasan dan prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu. Dalam konteks pelayanan publik, kebijakan sering disebut kebijaksanaan (Pramono, 2020). Implementasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sedangkan kebijakan merujuk pada prinsip dan pedoman dalam tindakan di berbagai sektor.

Implementasi kebijakan merupakan realisasi nyata dari kebijakan publik yang telah disusun oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Proses implementasi ini dilaksanakan setelah tahap perumusan kebijakan yang kompleks, karena melibatkan lebih banyak tenaga kerja, membutuhkan kemampuan organisasi yang mumpuni, dan bersifat interaktif, di mana berbagai pihak terkait harus saling berkoordinasi dan bekerja sama (Wahab, 2021). Tujuan utama implementasi kebijakan adalah memastikan tercapainya tujuan kebijakan dengan optimal.

Implementasi kebijakan dimulai setelah tujuan ditetapkan, program dikembangkan, dan dana dialokasikan. Aspek penting dalam

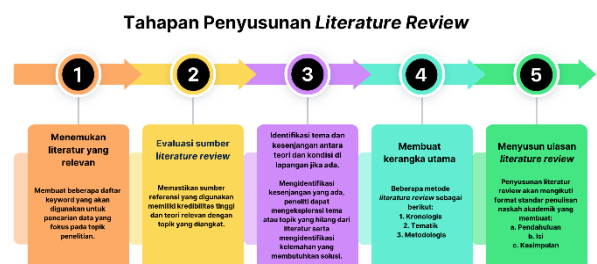
pengambilan kebijakan juga mempertimbangkan teori, model, pendekatan, langkah implementasi, serta faktor dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial memainkan peran signifikan dalam proses pengambilan kebijakan (Yuliah, 2020). Upaya mencapai hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti mengidentifikasi masalah yang akan diintervensi, menetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas, dan merancang struktur proses implementasi yang terencana dengan baik.

Tujuan dalam membuat kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas serta relevansinya dengan dinamika zaman, dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan dan responsif terhadap perubahan yang cepat. Jenis kebijakan mencakup peraturan, regulasi, pedoman, undang-undang, dan penyusunan agenda. Keberhasilan pembuatan kebijakan yang efektif tergantung pada kolaborasi antara tim multidisiplin, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang relevan dan mencerminkan kebutuhan serta realita sosial dan masyarakat yang terjadi di lapangan (Steiner *et al.*, 2024). Proses pengambilan kebijakan melibatkan interaksi dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi arah kebijakan yang akan ditetapkan.

Praktik kebijakan pendidikan terwujud dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Landasan kebijakan pendidikan memberikan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kebijakan pendidikan pemerintah harus didasarkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan pembelajaran karakter, sementara masyarakat memberikan dukungan aktif, dan pemerintah membuat kebijakan serta menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur yang dibutuhkan (Nabila *et al.*, 2024).

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis memilih dan menilai sejumlah literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian mensintesis temuan-temuan dari penelitian tersebut (Ridwan *et al.*, 2021). Penulis memilih metode ini karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan secara sistematis. Metode ini sangat cocok untuk menganalisis permasalahan yang diteliti karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang topik yang dibahas. Tahapan penyusunan *literature review* adalah sebagai berikut:



Sumber: (Cahyono *et al.*, 2019)

Pertama, peneliti menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui pencarian data berdasarkan kata kunci (Cahyono *et al.*, 2019). Kelayakan artikel ditandai dengan banyaknya jumlah kutipan yang dimiliki, sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi dalam penyusunan tinjauan literatur (Randolph, 2009; Hart, 2018). Sebanyak 50 artikel digunakan sebagai sumber data, dengan kata kunci yaitu transformasi, kebijakan, dan pendidikan. Sumber literatur tersebut diambil dari berbagai database terpercaya, seperti Scopus, Google Scholar, dan Sinta berputasi.

Kedua, peneliti melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber *literature review*. Memeriksa referensi yang memiliki kredibilitas tinggi dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Cahyono *et al.*, 2019). Meninjau dari teori awal dan konsep turunannya. Setelah mengevaluasi referensi, peneliti mencatat setiap referensi yang akan

digunakan, baik dalam bentuk konsep atau parafrase, untuk menghindari plagiarisme. Catatan ini juga memudahkan peneliti dalam memasukkan kutipan ke dalam literatur review (Jesson *et al.*, 2011). Setelah evaluasi, ditemukan 35 artikel yang relevan untuk digunakan sebagai data penelitian.

Ketiga, peneliti melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antara teori dengan kondisi lapangan (Cahyono *et al.*, 2019). Peneliti melakukan beberapa langkah yaitu: mengidentifikasi teori, metode, atau hasil; menemukan tema dan memetakan konsep yang terulang dalam literatur; mengenali perbedaan pendapat dan analisis kontradiksi dalam teori, metode, atau hasil; mengidentifikasi publikasi penting; menemukan kesenjangan dalam literatur dengan mengeksplorasi tema atau topik yang tidak tersedia. Peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah terkait pendidikan karakter di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dokumen kebijakan lain yang relevan. Peneliti menganalisis dokumen-dokumen kebijakan dilakukan untuk memahami tujuan, strategi, dan implementasi kebijakan pendidikan karakter yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang relevan dengan topik penelitian.

Keempat, membuat struktur garis besar dalam penyusunan literatur review (Cahyono *et al.*, 2019). Tahapan yang dapat dilakukan adalah: 1. Kronologis: Peneliti harus menyusun literatur review berdasarkan urutan waktu untuk memahami perkembangan kebijakan pendidikan karakter di Indonesia dari masa ke masa. 2. Tematik: Identifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur terkait transformasi pendidikan karakter di Indonesia, seperti nilai-nilai karakter, pendekatan implementasi, evaluasi kebijakan, serta tantangan atau kesempatan yang dihadapi. 3. Metodologis: Tinjau berbagai metode penelitian yang digunakan dalam literatur terkait untuk memahami pendekatan yang telah digunakan dalam mempelajari transformasi pendidikan karakter.

Langkah-langkah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian dan

menyusun literatur review yang terstruktur, meliputi: 1. Menetapkan tujuan penelitian dengan jelas, termasuk ruang lingkup transformasi pendidikan karakter yang ingin diteliti. 2. Melakukan tinjauan literatur kronologis untuk memahami perkembangan kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. 3. Identifikasi tema-tema utama dan metode penelitian yang digunakan dalam literatur terkait. 4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi online. 5. Menganalisis data sesuai dengan struktur garis besar yang telah disusun.

Kelima, penyusunan ulasan literatur review yang mengikuti format standar penulisan naskah akademik (Cahyono *et al.*, 2019), yang terdiri dari: 1. Pendahuluan literatur review: bagian ini harus jelas menetapkan fokus dan tujuan penulisan literatur review. 2. Isi literatur review: penyusunan isi literatur review disesuaikan dengan keinginan peneliti, tetapi harus memperhatikan agar tidak membuat pembaca merasa bosan atau kesulitan memahami isi. 3. Kesimpulan: pada bagian ini, peneliti merangkum temuan utama dari literatur review dan korelasi antara teori-teori yang dibahas.

Langkah-langkah untuk mendapatkan data yang sesuai format standar adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan literatur review: Menjelaskan secara singkat latar belakang masalah, konteks kebijakan pendidikan karakter di Indonesia, dan urgensi transformasi pendidikan karakter menuju visi Generasi Emas 2045. Menetapkan fokus dan tujuan literatur review, seperti menyelidiki evolusi kebijakan pendidikan karakter, menganalisis implementasi kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan atau tantangan yang perlu diatasi. 2. Isi literatur review: Melakukan tinjauan literatur kronologis untuk melacak perkembangan kebijakan pendidikan karakter dari masa ke masa, program-program pemerintah, dan inisiatif masyarakat sipil yang relevan. Mengorganisasikan isi literatur review berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti penekanan nilai-nilai karakter, pendekatan pembelajaran yang digunakan,

evaluasi kebijakan, serta tantangan dan peluang dalam implementasi. 3. Kesimpulan: Menyajikan ringkasan temuan utama dari literatur review, termasuk korelasi signifikan antara teori-teori yang dibahas jika ada. Menjelaskan implikasi temuan tersebut terhadap pemahaman tentang transformasi pendidikan karakter di Indonesia dan upaya menuju Generasi Emas 2045.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan Karakter yang Diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia

Pembentukan karakter siswa adalah sebagai penyeimbang kecakapan kognitif bagi peserta didik (Setiawan *et al.*, 2021). Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan karakter. Dasar hukum pendidikan karakter di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Berikut adalah penjelasan detail mengenai kebijakan-kebijakan tersebut: Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tahun 2016 telah bertransformasi menjadi Profil Pelajar Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila ini berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan utamanya adalah melestarikan moral bangsa, mempersiapkan generasi muda menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, mewujudkan keadilan sosial, dan membekali mereka dengan kecakapan abad ke-21 (Kahfi, 2022). Kompetensi inti yang menjadi pilar utama untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila meliputi: Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa: Menanamkan nilai-

nilai agama dan moralitas yang luhur dalam diri siswa. Kemandirian: Mendorong siswa untuk menjadi individu yang mampu bertanggung jawab, berinisiatif, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Gotong Royong: Mengembangkan semangat kerjasama, saling membantu, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kebhinekaan Global: Menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan siap beradaptasi dalam dunia yang beragam. Bernalar Kritis: Membekali siswa dengan kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis informasi secara kritis, dan memecahkan masalah dengan kreatif. Kreatif: Menginspirasi siswa untuk mengembangkan ide-ide baru, mengeksplorasi potensi diri, dan berkarya secara inovatif. (Pusat Penguatan Karakter, 2020)

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar adalah respons terhadap krisis pembelajaran yang berkepanjangan di Indonesia, termasuk rendahnya minat membaca masyarakat dan hilangnya pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013 dan dirancang agar guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang ramah lingkungan, menggugah minat belajar siswa, serta membiarkan siswa menemukan bakat masing-masing. Tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi, menumbuhkan kemandirian dalam belajar, meningkatkan kecakapan hidup dan keterampilan abad 21, menumbuhkan jiwa yang berkarakter mulia dan terpuji melalui pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Kurikulum ini juga berfokus pada pengembangan karakter anak dengan memberikan kesempatan belajar secara informal, tenang, gembira, dan tetap memperhatikan kemampuan bawaan mereka. Salah satu program unggulan dalam kurikulum ini adalah Projek Penguatan Profil Pembelajaran Pancasila (P5) bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Program ini diharapkan dapat menghasilkan siswa yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan

masyarakat, menjunjung tinggi prinsip moral yang tertanam dalam setiap sila Pancasila (Fauzan *et al.*, 2023). Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah yaitu mencetak generasi emas 2045.

Gerakan Sekolah Penggerak yang bertujuan melahirkan sekolah-sekolah teladan yang menjadi acuan transformasi pendidikan bagi sekolah-sekolah lain. Fokus utama program ini adalah pengembangan kepemimpinan sekolah yang visioner, penguatan kualitas pembelajaran dan budaya sekolah, serta peningkatan partisipasi komunitas sekolah dalam mendukung pendidikan karakter (Sumarsih *et al.*, 2022). Sekolah Penggerak diharapkan dapat mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan karakter dan membagikannya dengan sekolah lain.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan Mengembangkan hasil belajar siswa secara menyeluruh, meliputi kecerdasan intelektual (literasi dan numerasi) dan karakter mulia. Program ini diawali dengan peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru, yang kemudian menyebarkan pengetahuan dan praktik baik ke sekolah lain. (Sumarsih *et al.*, 2022). Pembentukan karakter terintegrasi dalam kurikulum, memotivasi guru untuk menghubungkan konten pembelajaran dengan nilai-nilai karakter melalui metode pengajaran yang mendorong diskusi, refleksi, dan pembelajaran aktif. Siswa juga aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan karakter seperti proyek sosial, kegiatan keagamaan, dan partisipasi dalam organisasi siswa.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pendidikan Karakter Menuju Generasi Emas 2045

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan karakter menuju Generasi Emas 2045 di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan pendidikan karakter menjadi faktor kunci. Efektivitas pencapaian tujuan pendidikan karakter memerlukan dukungan anggaran memadai, SDM berkualitas, dan pemantauan

serta evaluasi berkelanjutan. Pendidikan karakter menjadi pilar utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan, terutama di era modern yang penuh dengan kompleksitas dan dinamika. Pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan mampu menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat (Kamaruddin *et al.*, 2023).

Tentu! Berikut adalah beberapa kalimat yang baik dan sistematis untuk memberikan pendapat dan kesimpulan terkait dengan kolaborasi antar-stakeholder dalam implementasi nilai-nilai karakter:

Kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, komunitas, dan dunia usaha merupakan fondasi yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan implementasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, dapat diharapkan terciptanya lingkungan pendidikan yang mendukung, konsisten, dan berkelanjutan. Dukungan aktif dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kolaborasi bukan hanya memperkuat implementasi kebijakan tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap efektivitasnya (Wijayati & Tirtoni, 2024). Evaluasi yang terus-menerus dan penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan karakter tercapai secara optimal.

Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masa depan dan nilai-nilai karakter yang diinginkan merupakan kunci utama dalam mencapai efektivitas kebijakan pendidikan karakter (Martin & Simanjorang, 2022). Kurikulum yang holistik, terintegrasi, dan fleksibel mampu mengakomodasi berbagai aspek pembentukan karakter siswa secara menyeluruh. Pemasukkan nilai-nilai karakter ke dalam inti kurikulum, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan konsisten bagi siswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kurikulum yang relevan juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di era modern, seperti kepemimpinan, kolaborasi, dan etika kerja (Rambung *et al.*, 2023; Jaya *et al.*,

2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik mereka tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pengembangan kurikulum yang memadukan kebutuhan masa depan dengan nilai-nilai karakter yang diinginkan tidak hanya penting untuk pendidikan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi mendatang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan beretika.

Ketersediaan sumber daya fisik, finansial, dan manusia merupakan faktor krusial yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan karakter (Mayasari *et al.*, 2023). Sumber daya seperti buku teks yang relevan, fasilitas pendidikan yang memadai, alokasi dana yang cukup, dan tenaga pendidik yang berkualitas sangat menentukan kemampuan sekolah dalam menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter siswa secara komprehensif. Investasi dalam sumber daya ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang memberdayakan tenaga pendidik untuk memimpin dan mendukung inisiatif pendidikan karakter di sekolah. Dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang memadai, sekolah dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berintegritas, dan menginspirasi bagi seluruh siswa.

Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk orang tua, komunitas lokal, dan lembaga masyarakat lainnya, merupakan faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan karakter (Solissa *et al.*, 2024). Melibatkan masyarakat secara langsung tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai karakter yang diusung, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan di sekolah.

Partisipasi aktif masyarakat juga dapat berperan dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan karakter. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam pembuatan keputusan, sekolah dapat membangun hubungan yang saling

mendukung dan memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sekolah juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan mereka. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter tidak hanya memperkuat jaringan pendidikan lokal, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembentukan karakter yang positif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3. Peran Institusi Pendidikan, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter

Peran masing-masing pihak sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Berikut peran dari institusi pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan:

1. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum mereka, baik melalui mata pelajaran khusus maupun pendekatan lintas mata pelajaran. Untuk mendukung ini, institusi harus menyediakan pelatihan dan pengembangan berkala bagi guru agar mereka dapat mengimplementasikan pendidikan karakter dengan baik di dalam kelas. Dukungan dan sumber daya yang diperlukan, seperti materi, fasilitas, dan waktu, juga harus diberikan untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter di sekolah. Dalam upaya melaksanakan visi dan misi terkait pendidikan karakter, sejak tahun 2018, Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim pengembang sekolah di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Tim ini terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kompetensi dan motivasi tinggi untuk memberikan masukan serta membantu Kepala Dinas dalam perumusan implementasi kebijakan pendidikan karakter melalui bidang teknis. Beberapa produk yang telah dihasilkan oleh tim pengembang ini antara lain Panduan 7 Poe Atikan

Purwakarta, Model Pendidikan Anti Korupsi, Panduan Tatanen di Bale Atikan, dan masukan-masukan kebijakan lainnya. Selain itu, tim pengembang juga bertugas sebagai fasilitator atau pelatih program Tatanen di Bale Atikan dalam *In-House Training* yang dilakukan ke seluruh satuan pendidikan (Rachman *et al.*, 2023).

2. Masyarakat

Memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan masyarakat merupakan langkah penting. Ini bisa meliputi dukungan dalam kegiatan sekolah, kegiatan luar sekolah, atau pengembangan program-program karakter. Selain itu, menjadi contoh dan model perilaku positif bagi anak-anak dan remaja dalam masyarakat adalah hal yang tidak kalah penting. Keteladanan dari masyarakat akan membantu membentuk karakter yang baik pada generasi mendatang (Setiawatri & Kosasih, 2019). Masyarakat dapat membantu memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang berharga dalam pendidikan karakter, sehingga karakter lokal juga terwakili dan terhormat dalam pendidikan.

3. Pemangku Kepentingan

Membuat kebijakan yang mendorong implementasi pendidikan karakter di semua tingkatan pendidikan. Memastikan konsistensi dan efektivitas pendidikan karakter. Dukungan finansial yang memadai serta infrastruktur yang mendukung sangat diperlukan agar sekolah dapat mengimplementasikan program-program pendidikan karakter dengan baik (Rohman *et al.*, 2023).

Partisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja adalah langkah strategis untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Peluang magang atau kerja sama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha, siswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang mendukung perkembangan karakter mereka, serta memperluas

wawasan mereka terhadap dunia kerja (Fanani *et al.*, 2023).

Peran aktif dari institusi pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan karakter. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak ini tidak hanya memperluas dukungan terhadap program-program pendidikan karakter, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan beretika bagi siswa. Sinergi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembentukan karakter yang positif pada generasi mendatang. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan karakter dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif, membantu siswa mengembangkan potensi mereka tidak hanya dalam hal akademik tetapi juga dalam hal nilai-nilai moral dan sosial.

V. KESIMPULAN

Pendidikan karakter menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan melahirkan generasi yang berkarakter mulia dan siap berkontribusi bagi bangsa. Tantangan moral, dampak negatif kemajuan teknologi, ketidaksesuaian nilai dengan kebutuhan pasar kerja, perubahan sosial dan budaya, serta tuntutan visi Generasi Emas 2045 yang memunculkan perlunya transformasi dalam pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah. Upaya menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dapat diperkuat melalui pembentukan forum kerja bersama, pengembangan rencana aksi bersama, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kemitraan sekolah-masyarakat, pengakuan dan penghargaan, serta penggunaan teknologi dan media sosial. Penerapan upaya konkrit ini diharapkan dapat mendorong terjalannya sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga tercipta lingkungan pendidikan

yang ideal untuk mempromosikan dan memperkuat pembentukan karakter generasi mendatang, sejalan dengan visi Generasi Emas 2045.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Universitas Negeri Malang atas dukungan yang telah diberikan, dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan ini.

VII. REFERENSI

- Afrina, M., Siska, J., Agusta, O. L., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2022). The policy of mover school as a catalyst for improving the quality of education. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(1), 108-115.
- Aziz, F. Z., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai landasan pengelolaan pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 217-228.
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12-12.
- Chaiyakun, S., & Yang, J. W. L. (2024). Digital Renaissance: A Comprehensive Exploration Of Education Transformation-Hotspots, Models, And Strategic Approaches. *International Journal of Current Educational Practice*, 12(2), 86-95
- Fanani, F., Sugiharto, D. Y. P., & Yulianto, A. (2023, June). Inovasi Kemitraan SMK Bisnis Manajemen dengan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI): Menyiapkan Lulusan Siap Kerja dan Berdaya Saing. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 298-304).
- Fauzan, F., Ansori, R. A. M., Dannur, M., Pratama, A., & Hairit, A. (2023). The Implementation of the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Strengthening Students' Character in Indonesia. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1), 136-155.
- Hartinah, S., Patimah, L., Faruk, A., Zulkarnain, F., Mardikawati, B., & Prastawa, S. (2024). Inovasi Pendidikan Berkarakter Menciptakan Generasi Emas 2045. *Journal on Education*, 6(2), 13230-13237.
- Huda, M. (2017). Perpustakaan dan Mutu Pendidikan: Peran Dan Tantangan Perpustakaan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Libraria*, 5(2).
- Huda, M. N., Duwila, M., & Rohmadi, R. (2023). Menantang Disintegrasi Moral di Era Revolusi Industri 4.0: Peran Revolusioner Pondok Pesantren. *Journal of Islamic Education*, 9(1), 1-13.
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhurrozi, F. (2023). Transformasi Pendidikan: Peran Pendidikan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Abad ke-21. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2416-2422.
- Kahfi, A. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Karakter Siswa di Sekolah. *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 138–151.
- Kamaruddin, I., Zulham, Z., Utama, F., & Fadilah, L. (2023). Pendidikan Karakter di Sekolah: Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Etika Sosial dan Moral Siswa. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 140-150.
- Kemdikbudristek. (2021). *Kurikulum Prototipe Sebagai Opsi Dukung Pemulihan Pembelajaran*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/bl/og/2021/12/kurikulum-prototipesebagai-opsi-dukung-pemulihan-pembelajaran>. Diakses:13 Mei 2024.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar sebagai

- Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765-777.
- Listyaningsih, L., Alrianingrum, S., & Sumarno, S. (2021, May). Preparing Independent Golden Millennial Generation Through Character Education. In *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)* (pp. 162-167). Atlantis Press.
- Mahyuddin, M. J., Sura, H., & Sulaiman, F. (2024). Kajian Revolusi Konseling Islam dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Era Revolusi Mental 4. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6927-6935.
- Martin, R., & Simanjorang, M. M. (2022). Pentingnya peranan kurikulum yang sesuai dalam pendidikan di indonesia. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 125-134.
- Mayasari, N., Jusriati, J., Prayogo, P., Hajeni, H., Yati, Y., Ulpi, W., Saswati, R., Satar, M & Pajariato, H. (2023). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit Widina.
- Mayastinasari, V., Earliyanti, N. I., & Arnapi, A. (2024). Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Pori Menjadi Universitas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Nabila, A., Syahputri, A., Wandira, A., Aulia, C., Irvana, D., Syahfitri, D., & Okta, D. (2024). School level Education Policy. *IJEDUCA: International Journal of Education, Social Studies and Counseling*, 2(1).
- Negara, G. A. J., Ariyoga, I. N., & Putra, I. N. B. A. (2021). *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*. Surabaya: Mertajati Widya Mandala Publisher.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah juga mendukung penguatan pendidikan karakter.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Permatasari, M., & Murdiono, M. (2022). the Urgency of Political Ethics of Pancasila for the Millennial Generation Towards Golden Indonesia 2045. *European Journal of Social Sciences Studies*, 7(4).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta Unisri Press.
- Pusat Penguatan Karakter, 2020, Infografis Profil Pelajar Pancasila. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>. Diakses 28 Juni 2024.
- Rachman, E. A., Humaeroh, D., Sari, D. Y., & Mulyanto, A. (2023). Kepemimpinan Visioner Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 1024-1033.
- Rambung, O. S., Sion, S., Bungamawelona, B., Puang, Y. B., & Salenda, S. (2023). Transformasi Kebijakan Pendidikan Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 598-612.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Rohman, R. H., Prastyo, D., Hidayat, A. I., Mahmud, R. S., Syahririni, S., Rahmaniati, R., & Zannah, F. (2023). Implementasi Program Pendidikan bagi Anak-Anak WNI di ICC Ladang Kosma Malaysia. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 237-252.
- Saputra, A. T., Haikal, F. M., Wibowo, M. R., & Putri, S. A. E. (2023). Educators shape elementary students' moral values for Indonesia's Golden 2045. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(6), 1042-1053.
- Setiawatri, N., & Kosasih, A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Sosial Pada Masyarakat

- Pluralisme Di Cigugur Kuningan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2). 179-192.
- Solissa, E. M., Hayati, A. A., Rukhmana, T., Muharam, S., Mardikawati, B., & Irmawati, I. (2024). Mengembangkan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Menuju Society 5.0. *Journal on Education*, 6(2), 11327-11333.
- Steiner-Khamsi, G., Faul, M. V., Baek, C., Hopkins, A. N., & Iwabuchi, K. (2024). Strategic review: improving the use of evidence for education policy, planning and implementation.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.
- Suryana, Y., & Ismi, F. M. (2019). Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4(2), 257-266.
- Suwardani, N. P. (2020). "QUO VADIS" PENDIDIKAN KARAKTER: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat. Bali: UNHI Press
- Tsabita, A. W. Z., Fanfa, H. S., & Syahada, M. R. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Standar Manajemen Keamanan Sistem Perbankan. *Journal Central Publisher*, 1(4), 310-327.
- Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijarwadi, W & Alam, S. (2023). *Gonta-ganti Kurikulum di Indonesia: Apa Sebabnya?*.
<https://theconversation.com/gonta-ganti-kurikulum-di-indonesia-apa-sebabnya-215821#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20sejak%20pertama%20diterapkan,2006%2C%202013%2C%202022> . Diakses pada 12 Mei 2024.
- Wijayati, A., & Tirtoni, F. (2024). Analisis Faktor Kendala dan Hambatan Guru SD Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 304-311.
- Wurdianto, K., Juwita, D. R., Wisman, Y., & Bernisa, B. (2024). Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 15(1), 1-11.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Žiha, N. (2024). Value Education In Law School Curriculum: Cultivating Moral Autonomy. *Pravni vjesnik*, 40(1), 7-30.